

KEANEKA RAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT "PERSPEKTIF TATA KELOLA" DIHADAPKAN DENGAN KINERJA KEUANGAN

Oleh:
Piter Nainggolan

*Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia, Jakarta
Jl. Lodan Raya No.12, RT.9/RW.2, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430
Telp.021-6929090; Fax.021-6909712*

Email: pnainggolan@bundamulia.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana model corporate governance yang terintegrasi dan diperluas menjelaskan hubungan antara struktur corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi ini juga menguji pengaruh antara latar belakang dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan (*corporate financial performance*). Penelitian ini unik karena kami menganalisis keragaman komite dewan komisaris untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang cara berbagi keanekaragaman fungsi dewan dan nilai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diteliti berdasarkan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuantitatif dari sumber sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang akan dipelajari. Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa: (1) Latar belakang dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan; (2) Kewarganegaraan Dewan Komisaris perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. (3) Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan; dan (4) Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kata Kunci: Latar belakang dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit

ABSTRACT

The purpose of this study is to gain a better understanding of how an integrated and expanded corporate governance model explains the relationship between the structure of corporate governance and the financial performance of companies in companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study also examines the influence of the background of the board of commissioners, citizenship of the board of commissioners, independent board of commissioners, and audit committee on corporate financial performance. This study is unique in that we analyze the diversity of the board of commissioners' committees to gain broader insights on how to share the diversity of board functions and shareholder value on the Indonesia Stock Exchange. The sample studied was based on companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. Data is collected using quantitative techniques from secondary sources from the company's annual report to be studied. Based on test

results using panel data regression, it can be concluded that: (1) The background of the board of commissioners has a significant influence on the company's financial performance; (2) The citizenship of the company's Board of Commissioners does not have a significant influence on the company's financial performance. (3) Independent Board of Commissioners does not have a significant influence on the Company's Financial Performance; and (4) The Audit Committee has a significant influence on the Company's Financial Performance.

Keywords: *Background of the board of commissioners, citizenship of the board of commissioners, independent board of commissioners, audit committee*

PENDAHULUAN

Tingkat persaingan di dunia usaha saat ini sangatlah penuh persaingan yang sangat ketat. Untuk dapat menghadapi tingkat persaingan yang sangat ketat tersebut maka perusahaan haruslah mempunyai tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik serta sosok pemimpin perusahaan yang berkualitas dan benar-benar mengerti akan perusahaan yang akan dijelankannya supaya perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Setiap perusahaan yang dinamis dan terus berkembang untuk pertumbuhan usahanya, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik tersebut dimaksudkan untuk tetap dapat mempertahankan nilai-nilai yang dianut secara organisasional oleh perusahaan tersebut.

Tata kelola perusahaan yang baik, atau sering disebut *Good Corporate Governance*, merupakan isu yang dikenal bertahun-tahun lalu. Akan tetapi belum banyak perusahaan di Indonesia yang mengerti sepenuhnya akan pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut. Sebuah tata kelola yang baik akan meningkatkan tingkat pengendalian internal perusahaan yang efektif dan efisien agar perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaannya.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Good*

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham dengan, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Struktur dewan dalam perusahaan di Indonesia menganut sistem *two tier*, yakni terdiri dari direksi sebagai pengelola dan komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan (Wardhani, 2008). Dari mekanisme *Good Corporate Governance* tersebut, salah satu organ yang cukup memiliki peranan penting adalah Dewan Komisaris.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 1 ayat 3, Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihan

kepada Direksi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 28 Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Kemudian disebutkan juga di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 30 bahwa Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi. POJK ini semakin menguatkan bahwa Dewan Komisaris memiliki peranan penting di dalam mekanisme *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris juga merupakan satu organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan komisaris juga memberikan arahan / nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perseroan dimata masyarakat dan para pemegang saham (Gordini & Rancati, 2017).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 1 bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Perusahaan wajib memiliki Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) yang bertugas sebagai pengawas dan penasihat.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 35 Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha

Perseroan, sehingga diperlukan Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mengingat pentingnya peranan daripada Dewan Komisaris, maka kesalahan dalam pemilihan anggota dewan komisaris akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk itu penting melihat karakteristik dari Dewan Komisaris agar kinerja perusahaan dapat meningkat. Beberapa karakteristik dari Dewan Komisaris diantaranya adalah latar belakang pendidikan Dewan Komisaris, kewarganegaraan Komisaris, serta independensi dari Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) yang mencakup pengetahuan dan keahlian seseorang anggota dewan komisaris yang berhubungan dengan pendidikan bisnis (keuangan dan akuntansi) merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberlanjutan perusahaan khususnya di bidang kinerja keuangannya. (Dewi, et al., 2018).

Beberapa penelitian terkait latar belakang pendidikan dewan komisaris pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Nugroho (2014) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris yang diukur secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur

dengan Return On Asset. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, et al., 2018) dan Hassan & Marimuthu (2016), mengenai latar belakang pendidikan komisaris menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Adanya pasar bebas Asia Tenggara atau yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), semakin menimbulkan persaingan di bursa tenaga kerja. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga profesional. Hal ini menimbulkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Para perekrut tenaga kerja tentunya menginginkan orang-orang profesional yang ahli dalam bidangnya. Sayangnya, dilihat dari segi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sehingga perusahaan pun akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerja asing yang dinilai akan memberikan kontribusi yang positif.

Anggota dewan berkewarganegaraan asing dapat membawa ide, gagasan pengetahuan dan keahlian baru untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan meskipun perusahaan harus dengan penuh pertimbangan dalam mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mempekerjakan mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Widawati (2016) menunjukkan sebaliknya bahwa keberadaan dewan komisaris asing atau etnis minoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain keragaman dalam hal latar belakang pendidikan dan kewarganegaraan, independensi dalam dewan komisaris juga sangat penting dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena

itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33 /POJK.04/2014 Pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi, dalam artian tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya Komisaris Independen yang mempunyai persyaratan tersebut, maka dia akan mengawasi dengan lebih objektif terhadap kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian terkait komisaris independen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2018) dan Savero et al., (2017) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dewi (2016) menunjukkan sebaliknya, yaitu Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Selain dewan komisaris dalam organ perusahaan yang berperan penting terhadap kinerja perusahaan, komite audit juga tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Menurut POJK Nomor 55 Pasal 1 Ayat 1 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Komite Audit bertugas untuk memastikan pelaporan laporan keuangan sesuai dengan kinerja keuangan perusahaan agar laporan keuangan dapat memenuhi unsur *reliable*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik

untuk meneliti apakah faktor seperti latar belakang pendidikan komisaris, kewarganegaraan komisaris, independensi dari komisaris dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Definisi *stakeholder* telah berubah secara substansial selama empat dekade terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan. Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder*

dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial group*)-seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan 2000). Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ullman, 1985). Lebih lanjut Ullman (1985) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Berdasarkan argumen diatas, *stakeholder theory* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan *manage stakeholdernya* (Gray et al 1997). Ullman (1985) berpendapat bahwa *power stakeholder* berhubungan dengan “postur strategis” (*strategic posture*) yang diadopsi oleh perusahaan. Menurutnya, *strategic posture* menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan perusahaan terhadap tuntutan sosial.

Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage stakeholdernya* tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman 1985). Organisasi

mungkin mengadopsi strategis aktif akan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting (Ullman 1985). Hal ini menunjukkan bahwa *active posture* tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan *pasive posture* cenderung tidak terus menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Kurangnya perhatian *stakeholder* (dalam pendekatan *pasive posture*) akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan (Ullman 1985).

Meskipun *stakeholder theory* mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan mengenalkan hubungan antara *power* perusahaan dan mengenalkan hubungan antara *power* perusahaan dan *power stakeholder*, teori ini memiliki kelemahan. Kelemahan *stakeholder theory* terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *manage stakeholdernya*. Perusahaan diarahkan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada *stakeholder* yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Gray et al (1997) berpendapat bahwa *stakeholder theory* pada dasarnya merupakan pendekatan berbasis tekanan pasar (*market forces approach*) dimana penyediaan atau penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan tipe PSL pada titik waktu tertentu. Mereka yakin bahwa *stakeholder theory* mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a whole*) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan-termasuk keberadaan hukum

dan regulasi yang menghendaki adanya pengungkapan informasi tertentu.

Corporate Financial Performance

Kinerja keuangan perusahaan (*Corporate Financial Performance*) adalah suatu cara dimana investor dapat melihat sejauh mana sebuah perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar sehingga akan meningkatkan nilai bagi perusahaan (Rahayu & Nugroho 2014).

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Dimana kinerja yang menjadi pengukurannya adalah keefektifan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi perusahaan ini dapat diukur sebagai kinerja keuangan perusahaan karena berhubungan dengan segala pendapatan dan biaya-biaya selama kegiatan usahanya berjalan.

Corporate Financial Performance dapat didefinisikan sebagai kelayakan keuangan perusahaan atau sejauh mana perusahaan mencapai tujuan ekonomi. Indikator keuangan berbasis hasil seharusnya mencerminkan pemenuhan tujuan ekonomi perusahaan. Indikator tersebut termasuk pertumbuhan penjualan, profitabilitas (tercermin dari rasio seperti laba atas investasi, laba atas penjualan dan laba atas ekuitas), harga saham, laba per saham, dan sebagainya (Tan and AuYong, 2017).

Keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari seorang pimpinannya sebagai pengelola perusahaan dapat diukur dengan kinerja keuangannya yang ditunjukkan oleh jumlah penjualan, tenaga kerja, harta yang dimiliki dan analisis rasio, yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam analisis keuangan terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja

keuangan perusahaan salah satunya adalah rasion keuntungan perusahaan. Beberapa instrument keuangan dapat digunakan sebagai proxy keuntungan perusahaan ini. Pada pengukuran variabel *Kinerja Keuangan perusahaan* untuk setiap perusahaan dapat diukur dengan *Net Profit Margin*, *Return on Investment*, *Return on Equity* (Barus, et al., 2017).

Informasi yang berhubungan dengan variabel kinerja keuangan perusahaan dapat dipergunakan dalam melihat apakah mereka dapat mempertahankan uang/investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternative lain. Apabila kinerja suatu perusahaan baik maka nilai usaha makin tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi, akan membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Dengan demikian dapat disimpulkan dari argumentasi di atas, maka kinerja keuangan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai sebuah perubahan itu dapat potensial terhadap sumber daya ekonomi yang mungkin akan dapat dikendalikan di masa depan. Suatu prospek yang bagus oleh perusahaan untuk dapat menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Pengelolaan manajemen yang baik ditunjukkan dari tingkat kinerja keuangan perusahaan yang tinggi, oleh sebab itu semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka cenderung semakin baik kinerja keuangan perusahaannya sehingga kegiatan usaha perusahaan akan dapat terus berkelanjutan (*sustainability financial*).

Latar Belakang Pendidikan Komisaris

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *ducere*, berarti “menuntun, mengarahkan, atau memimpin” dan awalan *e*, berarti “keluar”. Jadi, pendidikan berarti kegiatan “menuntun ke luar”. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Pendidikan merupakan suatu proses dari pengalaman. Seseorang yang berkualitas tidak lepas dari faktor pendidikan. Menurut penelitian Dewi & Dewi (2016), mengemukakan bahwa salah satu bentuk human capital adalah pendidikan. Seseorang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik.

Latar belakang pendidikan formal anggota dewan komisaris dan direksi merupakan karakteristik kognitif yang dapat memengaruhi kemampuan dewan dalam pengambilan keputusan bisnis serta mengelola bisnis.

Seseorang yang berkompeten biasanya memiliki kepribadian moral tinggi dan memiliki kemampuan dalam membuat keputusan secara etis. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, baik pendidikan formal maupun non formal sesuai bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimiliki. Pengalaman intelektual ini akan dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Menurut Kusumastuti (2007) seseorang yang akan

masuk dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang

Pendidikan bisnis dan ekonomi. Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota dewan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis daripada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi. Pendidikan universitas membantu seseorang dalam kemajuan karirnya, di mana seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat.

Dewan komisaris seharusnya memiliki kemampuan dalam akuntansi atau keuangan yang memadai agar mereka bisa melakukan pengawasan yang lebih efektif dalam proses pembuatan laporan keuangan, dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dapat meningkatkan hasil kinerjanya karena komisaris tersebut paham terhadap akuntansi dan tidak mudah dikelabui oleh pihak manajemen sehingga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur suatu perusahaan. Dewan komisaris merupakan salah satu komponen corporate governance. Pasal 1 butir 6 dalam UU tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris yang efektif dalam melakukan tugasnya akan mengurangi kesalahan atau kelalaian, sehingga efektifitas dari dewan komisaris sebagai suatu mekanisme pengawasan, akan menentukan efektifitas dari penerapan *corporate governance*.

Kewarganegaraan Komisaris

Dewan komisaris asing (selain yang berwarganegara Indonesia – WNI, seperti yang berasal dari Amerika, Jepang, dan negara lainnya), dianggap memberikan dampak positif dalam meningkatkan nilai perusahaan. Masuknya dewan komisaris asing akan meningkatkan mekanisme monitoring terhadap perusahaan karena dewan komisaris asing biasanya adalah komisaris yang independen dan memiliki konflik yang lebih kecil.

Keberadaan dewan komisaris asing yang memiliki pengalaman yang lebih baik tentang operasi perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini dipercaya oleh beberapa pemilik perusahaan (*Owner*) dan pemegang saham perusahaan (*investor*). Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti telah membuktikan bahwa keterlibatan pihak asing dapat menjadi salah satu pendukung mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) karena pihak asing dianggap akan meningkatkan atau memperbaiki tata kelola suatu perusahaan (*corporate governance*).

Kepemilikan asing dianggap dapat mengurangi *agency problem* karena investor asing cenderung berinvestasi di perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang kondusif untuk mengelola masalah dan pada perusahaan yang memiliki proteksi yang baik terhadap pihak luar.

Komisaris Independen

Karakteristik dewan komisaris juga dapat diukur dari tingkat independensi anggota dewan komisaris. Dewan dengan komposisi komisaris independen yang baik akan berdampak dengan cukup kuatnya aktivitas perilaku pengawasan manajerial yang lebih ketat sehingga menambah nilai pemegang saham yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Kusumastuti dkk., 2006).

Kusumastuti dkk. (2006) mengemukakan bahwa dewan perusahaan yang didominasi oleh pihak luar perusahaan akan menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih kuat karena mereka bersifat lebih independen dalam mengawasi perilaku manajemen di dalam menjalankan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan keuangan pada khususnya.

Komisaris Independen diungkapkan dapat berperan dalam aktivitas pengawasan, keberadaan *outside directors* akan membantu manajemen menyusun strategi bisnis dengan keahlian dan pengetahuan mengenai teknologi dan pasar yang dimiliki oleh mereka. Keberadaan komisaris independen (*outside commissioners*) pada intensitas aktivitas pengawasan oleh dewan perusahaan.

Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) nomor 55 /POJK.04/2015, menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

Komite audit adalah wajib ada di sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55 /POJK.04/2015 pasal 2 yang menyatakan bahwa: Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Komite audit adalah komite dibawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangkurangnya seorang komisaris independen dan profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung

jawabnya termasuk membantu para auditor tetap independen dari manajemen (POJK, 2015).

Komite Audit yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dengan manajemen. Komite Audit di dalam suatu perusahaan mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan public. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55 /POJK.04/2015 pasal pasal 9 sampai dengan pasal 11.

Mnurut penelitian Savero, dkk. (2017), menyatakan bahwa komite audit memainkan peran penting untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan. Komite audit sebagai penghubung antara auditor eksternal dan manajemen, menjembatani asimetri informasi diantara keduanya. Sehingga peranan komite audit sangatlah penting di dalam perusahaan.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Tugas utama dan tanggung jawab Komite Audit adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*), terutama transparansi dan keterbukaan, diterapkan secara konsisten dan memadai oleh eksekutif.

Emiten atau perusahaan publik harus memastikan bahwa fungsi komite audit dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnya telah tercatat dibursa (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Emiten atau Perusahaan Publik yang besar, harus memiliki komite audit sedangkan untuk perusahaan non publik yang lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komite audit bagi sebuah perusahaan publik merupakan organ penting dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip *check and balances*.

Corporate Governance

Indonesia Stock Exchange (2018) menyatakan penerapan *corporate governance* dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan struktur, proses, dan prinsip.

1. Pendekatan struktur merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menciptakan atau memperbaiki struktur yang dapat mendukung penerapan *good corporate governance* di perusahaan, baik di tingkatan organ utama maupun organ pendukung.
2. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada pengaturan proses-proses *governance* yang lebih baik. Bentuk pendekatan ini tidak terbatas pada pemberdayaan atau optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan operasional perusahaan.
3. Pendekatan prinsip merupakan pendekatan yang mengutamakan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal.

Berikut adalah prinsip-prinsip OECD (2004) yang melandasi pengukuran tingkat penerapan *corporate governance* pada perusahaan.

1. Menjamin kerangka dasar *corporate governance* yang efektif
Prinsip pertama menyatakan bahwa *corporate governance* harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting kepemilikan saham
Prinsip *corporate governance* yang kedua dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai hak-hak

pemegang saham dan fungsi – fungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham

Pada prinsip ketiga ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Untuk itu industri pasar modal harus dapat melindungi investor dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.

Untuk melindungi investor, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham, seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertentu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

4. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*

Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (*mutual agreements*) dan

mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainabilitas) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan.

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholder* tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para *stakeholder* dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

5. Keterbukaan dan transparansi

Pada prinsip kelima ini ditegaskan bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insidental. Pengalaman di banyak negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa

keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

6. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁: Latarbelakang Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*.

H₂: Kewarganegaraan Dewan Komisaris mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*.

H₃: Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*.

H₄: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini yang menjadi subjek penelitian adalah

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange pada periode tahun 2015-2017. Pada penelitian ini, perusahaan yang terdapat pada kelompok industri pertambangan yang dipilih, karena kondisi dewan komisaris yang kebanyakan terdiri dari anggota komisaris asing dan memiliki kinerja keuangan perusahaan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lain yang ada di *Bursa Efek Indonesia (IDX)*. Selain itu, pada perusahaan industri pertambangan dipilih sebagai sampel penelitian ini dikarenakan sektor pertambangan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang paling besar dibandingkan sektor lainnya di dalam PNBP (Direktorat Penyusunan APBN, 2018).

Perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan, umumnya dapat berbentuk usaha terpadu dalam arti bahwa perusahaan tersebut memiliki usaha eksplorasi, pengembangan dari konstruksi, produksi, dan pengolahan sebagai satu kesatuan usaha atau berbentuk usaha-usaha terpisah yang masing-masing berdiri sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut.

Pengembangan Instrumen Penelitian Definisi Operationalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi variabel dependen (Sujarweni, 2015). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi

atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sujarweni, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Latarbelakang dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *corporate financial performance*.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan sebuah perusahaan pada umumnya untuk mendapatkan keuntungan. Keruntungan dari usaha perusahaan tersebut, dapat diukur dengan rasio profitabilitas, dimana alah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan salah satu *proxy* yang terdapat dalam rasio profitabilitas yaitu Return on Asset (ROA). Dengan membandingkan laba perusahaan bersih (net income) dengan total aset. Menurut Manrique and Ballester (2017), ROA dapat diukur dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Incomes}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Keterangan:

ROA = Return on Asset (tingkat pengembalian aset)

Net Incone = Laba Bersih Perusahaan

Total Aset = Seluruh Aset Perusahaan

Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris

Latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para perusahaan untuk mencari anggota dewan yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Latar belakang pendidikan dewan komisaris adalah basis pendidikan tertentu di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris perusahaan.

Pada penelitian ini pengukuran latar belakang pendidikan komisaris mengadopsi dari pengukuran penelitian Rahayu & Nugroho (2014), yang dapat diukur, sebagai berikut:

Σ Komisaris Berlatar belakang pendidikan =

$$\frac{\text{Latar Belakang Pendidikan Komisaris}}{\Sigma \text{ Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Kewarganegaraan Dewan Komisaris Independen

Pada proxy pengukuran variabel Kewarganegaraan komisaris pada penelitian-penelitian terdahulu yang ada di Indonesia kebanyakan diukur dengan variabel dummy, yaitu: nilai (1) jika ada anggota dewan komisaris berwarganegara asing; dan nilai (0) jika tidak ada anggota dewan komisaris berwarganegara asing.

Pada penelitian ini, pengukuran kewarganegaraan dewan komisaris asing merupakan persentase keseluruhan jumlah komisaris asing dibagi dengan banyaknya anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan tersebut.

Pada penelitian ini pengukuran kewarganegaraan komisaris mengadopsi dari pengukuran penelitian Pradono & Widowati (2016), yang dapat diukur, sebagai berikut:

Σ Anggota Dewan Komisaris WNA

$$\frac{\text{Komisaris Ber-WNA}}{\Sigma \text{ Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Pada penelitian ini, pengukuran yang dipakai untuk variabel Komisaris Independen adalah proporsi dewan komisaris independen. Jumlah anggota dewan komisaris independen merupakan perbandingan jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada di perusahaan tersebut.

Pada penelitian ini pengukuran Komisaris Independen mengadopsi dari

pengukuran penelitian Savero, *et al.* (2017) dapat diukur, sebagai berikut:

Σ Anggota Komisaris Independen =

$$\frac{\text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{ Total Anggota Komisaris Independen}} \times 100\%$$

Komite Audit

Pengukuran yang dipakai pada penelitian ini untuk variabel Komite Audit adalah total jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan.

Pada penelitian ini pengukuran Komite Audit mengadopsi dari pengukuran penelitian Savero, *et al.* (2017) dapat diukur, sebagai berikut

Komite Audit = Σ Komite Audit Perusahaan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari laporan keuangan (*annual report*) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak pada sektor aneka industri. Perusahaan sektor aneka industri di Indonesia merupakan salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan pasar yang sangat besar dan kondisi harga yang sangat baik.

Menunjukkan terdapat 41 perusahaan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipilih menjadi sampel penelitian dengan periode penelitian 3 tahun dari 2015-2017, sehingga diperoleh jumlah data secara keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 102 data.

Tabel 1
Hasil Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Deskripsi Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan (<i>annual report</i>) terdaftar di Indonesia Stock Exchange per tahun 2015-2017	40
2.	Perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan (<i>annual report</i>) pada akhir tahun fiskal 31 Desember secara berturut-turut dari tahun 2015-2017.	(5)
3.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi yang diperlukan dalam penelitian secara lengkap dalam laporan tahunan perusahaan secara berturut-turut dari tahun 2015-2017.	(1)
Jumlah perusahaan		34
Jumlah Sampel untuk penelitian (periode 3 tahun)		102

Sumber : Hasil Pengumpulan Data oleh Peneliti (2020)

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 34 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel penelitian dengan periode penelitian selama 3 (tiga) tahun dari 2015-2018, sehingga diperoleh jumlah data secara keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 102 data yang terdiri dari 34 perusahaan.

Analisis Data dan Interpretasi Data

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18536817
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.115
	Negative	.170
Test Statistic		.170
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Output SPSS Versi 24.0 diolah peneliti (2020)

Hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan nilai *asymp.sig. (2-tailed)* yang diperoleh sebesar 0,117 yang berarti nilai *asymp.sig. (2-tailed)* di atas 0,05. Ini berarti H_0 tidak dapat ditolak yang menunjukkan bahwa data untuk variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini terdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa data-data untuk kesemua variabel tersebut memiliki sebaran data yang terpusat pada rata-rata nilainya yang menunjukkan sebaran data yang terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.910	1,099
	X2	.960	1,042
	X3	.923	1,085
	X4	.936	1,071

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 24.0 diolah peneliti (2020)

Hasil uji multikolinearitas dari tabel 3 menunjukkan bahwa agresivitas pajak, reputasi auditor, pengungkapan media dan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen ada penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Ini berarti model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-.020	.031		-.653	.516
	KOMBCK	.022	.032	.079	.686	.495
	KOMWNA	.050	.065	.085	.761	.449
	KOMIDPN	0,35	0,73	.095	.939	.103
	KOMAUD	.001	.001	.239	2.118	.187

Sumber: Output SPSS 24.0 diolah peneliti (2020)

Hasil uji heteroskedastisitas dari tabel 4 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai *sig. (2-tailed)* di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.269 ^a	.367	.331	.0591119	1.590
a. Predictors: (Constant), X1, X2					
b. Dependent Variable: CorFin_Per					

Sumber : Output SPSS diolah peneliti (2020)

Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini $n=102$ dan $k=3$, menurut tabel durbin-watson yang digunakan pada data statistik adalah sebagai berikut: $1,5323 < 1,5579 < 1,7059$ yang berarti nilai durbin-watson sebesar 1,5590 diantara dL dan dU yang berarti bahwa tidak terjadinya autokorelasi pada model regresi penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas yaitu latar belakang dewan komisaris, kewarganegaraan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange periode 2015 sampai dengan 2017 seperti yang terlihat di table 6 dibawah ini.

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.269 ^a	.367	.331	.0591119

Sumber: data olahan SPSS 24.0 (2020)

Hasil uji korelasi pada tabel 5.8, menunjukkan nilai R yang diperoleh bernilai positif yaitu sebesar 0,260. Nilai R yang diperoleh dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara variabel penelitian.

Nilai pada kolom *Adjusted R Square* menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap nilai perusahaan. Jadi besarnya pengaruh variabel independen pada penelitian ini terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada entitas yang termasuk dalam perusahaan sektor pertambangan untuk periode tahun 2015-2017 adalah 33,10%. Pengaruh faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar $(100\% - 33,10\%) = 66,90\%$. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh lain di luar variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.017	3	.006	1.591	.016 ^b
	Residual	.279	79	.004		
	Total	.296	82			

a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), KOMAUD, KOMIDPN, KOMBCK

Sumber: data olahan SPSS 24.0 (2020)

Tabel 7 diatas menunjukkan nilai F sebesar 1,591 dan nilai *sig.* (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,016 yang berarti nilai *sig.* (2-tailed) tersebut di bawah 0,05. Ini berarti H_0 tidak dapat ditolak yang berarti model regresi layak dan tepat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

a. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda Model Penelitian

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu antara Latarbelakang Dewan Komisaris (X_1), Kewarganegaraan Dewan Komisaris (X_2), dan Dewan Komisaris Independen (X_3), dan Komite Audit (X_4) terhadap

Corporate Financial Performance (Y). Untuk mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi regresi maka digunakan bentuk persamaan. Persamaan atau model tersebut berisi konstanta dan koefisien-koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 24 yang disesuaikan dengan persamaan regresi. Adapun hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.320	.031		-.722	.473
X1	.010	.034	.037	.309	.038
X2	.030	.068	.050	.436	.112
X3	.071	.001	.196	1.643	.137
X4	.035	.031	.137	1.136	.039

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer olahan SPSS 24.0 (2020)

Berdasarkan tabel di atas hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Dimana:

X_1 = Latar belakang Dewan Komisaris

X_2 = Kewarganegaraan Dewan Komisaris

X_3 = Dewan Komisaris Independen

X_4 = Komite Audit

Y = *Corporate Financial Performance*

Persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta diperoleh sebesar 0,320 artinya apabila Latar belakang Dewan Komisaris, Kewarganegaraan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit bernilai nol, maka *Corporate Financial Performance* bernilai 0,320.

2. Koefisien regresi nilai Latarbelakang Dewan Komisaris sebesar 0,010 berarti bahwa jika Kewarganegaraan Dewan Komisaris naik 1 satuan, maka akan meningkatkan *Corporate Financial Performance* sebesar 0,010 satuan dengan asumsi Kewarganegaraan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit konstan.
3. Koefisien regresi nilai Kewarganegaraan Dewan Komisaris sebesar 0,030 berarti bahwa jika Kewarganegaraan Dewan Komisaris naik 1 satuan, maka akan meningkatkan *Corporate Financial Performance* sebesar 0,030 satuan dengan asumsi Latarbelakang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit konstan.
4. Koefisien regresi nilai Dewan Komisaris Independen sebesar 0,071 berarti bahwa jika Dewan Komisaris Independen naik 1 satuan, maka akan meningkatkan *Corporate Financial Performance* sebesar 0,071 satuan dengan asumsi Latarbelakang Dewan Komisaris, Kewarganegaraan Dewan Komisaris, dan Komite Audit konstan.
5. Koefisien regresi nilai sebesar 0,035 berarti bahwa jika Komite Audit naik 1 satuan, maka akan meningkatkan *Corporate Financial Performance* sebesar 0,035 satuan dengan asumsi Latarbelakang Dewan Komisaris, Kewarganegaraan Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Independen konstan.

Interpretasi Data

Pengaruh Latar Belakang Dewan Komisaris Terhadap *Corporare Financial Performance*

Dalam pengujian hipotesis, dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel 5.10 diperoleh hasil sebagai berikut: Pengujian Latarbelakang Dewan

Komisaris terhadap *Corporate Financial Performance* dengan menggunakan regresi berganda diperoleh nilai t sebesar 0,309 dan nilai signifikansi sebesar 0,758. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi Latarbelakang Dewan Komisaris sebesar 0,038 yang mempunyai nilai tidak lebih besar dari 0.05. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Latarbelakang Dewan Komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *Corporare Financial Performance*.

Pengaruh Kewarganegaraan Dewan Komisaris Terhadap *Corporare Financial Performance*

Dalam pengujian hipotesis, dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel 5.10 diperoleh hasil sebagai berikut: Pengujian kewarganegaraan dewan komisaris terhadap *corporate financial performance* dengan menggunakan regresi berganda diperoleh nilai t sebesar 0,436 dan nilai signifikansi sebesar 0,112. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi Kewarganegaraan Dewan Komisaris sebesar 0,112 yang mempunyai nilai lebih besar dari 0.05. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Kewarganegaraan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Corporare Financial Performance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Corporare Financial Performance*

Dalam pengujian hipotesis, dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel 5.10 diperoleh hasil sebagai berikut: Pengujian Dewan Komisaris Independen terhadap *Corporare Financial Performance* dengan menggunakan regresi berganda diperoleh nilai t sebesar 1,810 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi Dewan Komisaris Independen sebesar

0,137 yang mempunyai nilai lebih besar dari 0.05. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa H_3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Corporare Financial Performance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Corporare Financial Performance*

Dalam pengujian hipotesis, dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan pada tabel 5.12 diperoleh hasil sebagai berikut: Pengujian Komite Audit terhadap *Corporare Financial Performance* dengan menggunakan regresi berganda diperoleh nilai t sebesar 2,818 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi Komite Audit sebesar 0,009 yang mempunyai nilai lebih kecil dari 0.05. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Corporare Financial Performance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan:

1) Latarbelakang Dewan Komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *Corporare Financial Performance*. Dewan Komisaris yang terdiri beberapa latarbelakang pendidikan akan lebih dapat mempengaruhi *Corporare Financial Performance*, dimana hal ini dapat meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Latarbelakang pendidikan dewan komisaris dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka akan semakin baik di dalam pengambilan keputusan perusahaan sehingga.

- 2) Kewarganegaraan Dewan Komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap Reputasi Perusahaan. Gender wanita pada anggota dewan direktur dapat mempengaruhi *Corporare Financial Performance*. Kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan dewan komisaris, baik itu komisaris yang berwarganegaraan asing tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (*corporate financial performance*). Sehingga lebih baik perusahaan menggunakan dewan komisaris berkewarganegaraan Indonesia (WNI) saja.
- 3) Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap *corporate financial performance*. Jumlah anggota Dewan Komisaris mau seberapa banyak tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebaiknya anggota dewan komisaris hanya berjumlah sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku menurut peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) saja, tidak perlu melebihi dari jumlah yang diwajibkan.
- 4) Komite Audit mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *Corporare Financial Performance*. Proporsi jumlah anggota komite audit sebaiknya lebih banyak sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan didalam mempertimbangkan keputusan melibatkan beberapa anggota komite audit yang dapat diyakini lebih berpengalaman dan mempunyai pertimbangan eksternal perusahaan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat maka peneliti menyarankan beberapa hal yang diharapkan dapat membantu pihak perusahaan di dalam meningkatkan *corporate reputation*. Saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perusahaan publik atau emiten yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange sebaiknya melakukan audit keuangan secara rutin dan menganalisa lebih dalam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting bagi manajemen perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode dalam penelitian dan memperluas sampel penelitian dikarenakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan sample sebanyak 34 perusahaan. Dengan memperluas sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan lebih banyak, diharapkan penelitian berikutnya dapat menjadi bahan referensi bagi manajemen perusahaan di dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian lainnya yang mungkin mempengaruhi reputasi perusahaan dikarenakan variabel pada penelitian ini hanya gender dewan komisaris, gender dewan direksi, dewan komisaris berkewarganegaraan asing Sedangkan selain ketiga faktor tersebut masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (*corporate financial performance*).
4. Penelitian ini hanya menggunakan data dari perusahaan industry dasar dan selain lembaga jasa keuangan yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* sehingga tidak menggunakan data lembaga jasa keuangan, sebaiknya penelitian selanjutnya memasukkan industry lainnya termasuk sektor lembaga jasa keuangan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange.

5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan perusahaan yang terdaftar bukan saja di bursa efek yang ada di Indonesia, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di negara lain, seperti di Singapore (Singapore Stock Exchanges), Malaysia (Malaysia Stock Exchanges).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiero, S., Cane, M., Bernardi, P.D., and Venuti, V. (2016). "Does Board Gender Diversity Affect Corporate Reputation? Evidence from Italy's Most Reputable Companies". *World Journal of Management*, Vol. 7. No. 1, Issue. Pp. 141 – 151
- Bergman, J.P., Knutas, A., Luukka, P., Jantunen, A., Tarkiainen, A., Karlik, A., Platonov, V. (2016). "Strategic interpretation on sustainability issues – eliciting cognitive maps of boards of directors", *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 16, Issue 1, pp. 162-186
- Brammer, S., Millington, A. and Pavelin, S. (2009). "Corporate Reputation and Women on the Board". *British Journal of Management*, Vol. 20, pp.17–29.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2016). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, A.S., Sari, D. dan Abaharis, H. (2018), "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Benefita kopertis wilayah x* Vol.3, No. 3, Hall. 445-454. *Review of Integrative Business and Economics*

Research, Vol. 7, Supplementary
Issue 1 299

- Dewi, L.G.K. dan Dewi, A.A.(2016),
“Pengaruh Diversitas Dewan
Komisaris dan Direksi Pada
Perusahaan Pada Perusahaan Sektor
Keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2009-2013”,
E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana, Vol.16, No. 1, Hal. 812-
836. ISSN: 2302-8556.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat
Jenderal Anggaran, (2018),
“Informasi APBN 2018 -
Pemantapan pengelolaan fiskal
untuk mengakselerasi pertumbuhan
ekonomi yang berkeadilan,
www.anggaran.kemenkeu.go.id
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good
Corporate Governance Terhadap
Kinerja Keuangan Pada Perbankan
Syari’ah Indonesia, Jurnal
Akuntansi, Vol 5 No. 1, ISSN 2549-
5968.
- Endraswati, H. (2018), “Gender Diversity
in Board of Directors and Firm
Performance: A Study in Indonesia
Sharia Banks”, Review of
Integrative Business and Economics
Research, Vol. 7, Issue 1, page.
299-311. ISSN: 2304-1013
(Online); 2304-1269 (CDROM);
2414-6722 (Print)
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program IBM
SPSS 23. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J.H.; T. Hamilton; dan Holmes.
(2013). Accounting Theory. 7th
Edition. Queensland: John Wiley
and Sons Inc.
- Gordini, N., & Rancati, E. (2017). Gender
Diversity in the Italian boardroom
and firm financial performance.
Management Research Review, Vol
40 No.1, pp.75-94.
- Hanani, F., & Aryani, Y. A. (2011).
Pengaruh Gender Dewan
Komisaris, Gender Dewan Direksi,
dan Kepemilikan Manajerial
terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal
Wahana, Vol.14 (1).
- Hassan, R., and Marimuthu, M. 2016.
Corporate Governance, Board
Diversity, and Firm Value :
Examining Large Companies Using
Panel Data Approach. Economics
Bulletin, 36(3), 1737–1750.
- Huiting, H. (2016). “The impact of gender
board diversity on a firm’s financial
performance.” Master Thesis
Finance, Tilburg University, pp. 1-
47
- Huse, M. dan Solberg, A. G. (2006)
"Gender- related boardroom
dynamics: How Scandinavian
women make and can make
contributions on corporate boards",
Women in Management Review,
Vol. 21 Issue: 2, pp.113-130
- Kılıç, M. and Kuzey, C. (2016), "The
effect of board gender diversity on
firm performance: evidence from
Turkey", Gender in Management:
An International Journal, Vol. 31
Iss 7 pp. 434 – 455
- Lei, A.C.H. and Deng, J. (2014), “Do
multiple directorships increase firm
value? Evidence from independent
directors in Hong Kong”, Journal of
International Financial Management
& Accounting, Vol. 25 No. 2, pp.
121-181.
- Lestari, E dan Murtanto (2017),
“Pengaruh Efektivitas Dewan
Komisaris dan Komite Audit,

- Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba”, Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 17 No.2, Hal. 97-116. ISSN 1411 – 8831 (Print). ISSN 2442 - 9708 (Online).
- Liu, G., and Sun, J. 2010. Director Tenure and Independent Audit Committee Effectiveness. International Research Journal of Finance and Economics, 51: 176-189.
- Liu, Y., Wei, Z and Xie, F. 2016. CFO gender and earnings management: evidence from China, Review of Quantitative Finance and Accounting, 46 (4): 881-905.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta: Diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pardede, R. (2014). Analisis Jalur Path Analysis Teori dan Aplikasi Dalam Riset Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, B.P.D. (2015), “Pengaruh Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Terhadap Kinerja Perusahaan”, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Vol. 8, No. 2, Hal. 70-85.
- Rahayu, S. dan Nugroho, S. (2014), “Pengaruh Komposisi dan Pendidikan Dewan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.12 No.4, Hal. 357-367.
- Ramadhani, N., Sari, R.N. dan Darlis, E. (2015), “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Risiko Perusahaan (Studi Terhadap Perusahaan yang Terdaftar pada BEI indeks KOMPAS 100 Tahun 2010 s.d 2012)”, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 1, Hal. 18 - 32. ISSN 2337-4314.
- Savero, D.O., Nazir, A., dan Safitri, D. (2017), “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institutional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)”, JOM Fekon Jurnal, Vol.4 No.1, Hal. 75-89.
- Sugiyono (2015). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2014). Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumayyah, Gentyowati, E. (2018). Earnings Management, CEO Tenure, And Gender Diversity in the Board Of Director – Indonesian Evidence. International Journal of Economics, Business and

Management Research, Vol. 2, No. 02, pp. 496-506

- Tan, S.S. and AuYong, H.N. (2017), "The Role of Women Directors on Corporate Boards in Firm Performance: A Review and Research Agenda", International Conference on Business, Accounting, Finance, and Economics, Universiti Tunku Abdul Rahman, Kampar, Perak, Malaysia. Hal. 629-629.
- Tarigan, J., Hervindra, C. and Hatane, S.E. (2018), "Does Board Diversity Influence Financial Performance?" International Research Journal of Business Studies, Vol.11 No.3, pp. 193 – 215. ISSN: 2089-6271. E-ISSN: 2338-4565 |
- Van der Walt, N. & Ingley, C. (2003), "Board dynamics and the influence of professional background, gender and ethnic diversity of directors", Corporate Governance Journal, Vol 11, pp. 218-234.
- Wagana, D.M dan Nzulwa, J.D. (2016). Corporate Governance, Board Gender Diversity And Corporate Performance: A Critical Review Of Literature. European Scientific Journal, Vol.12, No.7, pp. 1857 – 7881.